

Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Fungsional Tahun 2023

Oleh : drh. Dewi Sholihah dan
Tim Kelompok Substansi KSKH
Medik Veteriner Madya

Direktorat Kesehatan Hewan melalui Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner dalam upaya peningkatan status kesehatan hewan, medik dan paramedik veteriner sebagai tenaga kesehatan hewan. Peserta sebanyak 69 orang yang merupakan perwakilan dari Pejabat Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner Provinsi di seluruh Indonesia.

Medik dan paramedik veteriner sebagai tenaga kesehatan hewan memiliki peran yang sangat penting karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan peternak dalam rangka mencegah penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui pelayanan kesehatan hewan dan surveilans penyakit hewan.

Terbitnya Peraturan PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Perka BKN No.3 tahun 2023 tentang Angka Kredit,

Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, merubah ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan cara penilaiannya. Penilaian angka kredit tidak ada lagi berdasarkan pengajuan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) namun berdasarkan ekspektasi terhadap kinerja pegawai yang dinilai secara berkala setiap triwulan dan tahunan. Penilaian kinerja pegawai juga dilihat berdasarkan kesesuaian dan kontribusinya dalam mendukung tercapainya target kinerja organisasi.



Pembukaan oleh Direktur Kesehatan Hewan



Rakor ini membahas pentingnya penyiapan formasi jabatan fungsional medik dan paramedik pasca pemberlakuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di masing-masing daerah dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kesehatan hewan.

Rakor berlangsung selama 3 hari di Harper Hotel, Palembang, Sumatera Selatan. Penyampaian materi hari pertama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan judul Implementasi Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Materi kedua dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan judul Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.





Pada hari ke 2 dilakukan kunjungan ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, terkait pelaksanaan biosekuriti yang merupakan tugas dari Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner dalam rangka menjaga pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian dengan judul Kebijakan Kementan dengan terbitnya PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan disampaikan oleh Bu Priyantina, SP, MAP dan Bu Yulia Komar, SP.



"Pokok yang disampaikan tentang tugas-tugas instansi Pembina".



Pada Hari ke III kegiatan yang dilakukan yaitu verifikasi Data Medik dan Paramedik dalam Sistem DISPAKATI oleh Tim Kepegawaian Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Verifikasi tersebut dalam rangka penyesuaian data pejabat fungsional Medik dan Paramedik Veteriner berupa angka kredit konvensional menjadi angka integrasi.

Setelah pertemuan ini diharapkan tercapainya pemahaman tentang Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, sehingga tujuan transformasi birokrasi yaitu penyederhanaan birokrasi dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional dapat dilakukan dengan baik sampai level daerah.

